

Pemkab Buton Selatan Tegaskan Rekaman Viral Bupati Soal Mobil Dinas Diduga Telah Diedit, Berikut Penjelasan Resmi



Di tengah polemik tersebut, Pemkab memastikan pelayanan publik dan program pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya, sembari melakukan penelusuran terhadap sumber dan keaslian rekaman yang beredar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Buton Selatan La Ode Aris Hardian menyampaikan bahwa hasil penelusuran awal menunjukkan adanya dugaan pengeditan terhadap rekaman tersebut.

"Rekaman yang beredar diduga tidak utuh karena telah melalui proses pengeditan dan pemotongan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman," ujarnya.

Menurutnya, potongan informasi yang tersebar tidak mencerminkan konteks percakapan yang sebenarnya, sehingga berisiko membentuk persepsi yang keliru di tengah masyarakat.

Lanjut ke Hal: 7

Laporan: Firman, Baubau Post-Durasi Times

BUTON SELATAN, BPPemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Selatan menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga stabilitas daerah di tengah beredarnya rekaman percakapan yang dikaitkan dengan Bupati Muhammad Adios yang viral di media sosial sejak Selasa (24/3/2026).

Remisi dan Silaturahmi Warnai Idul Fitri 1447 H di Lapas Kelas IIA Baubau, 284 Napi Dapat Pengurangan Hukuman



Penyerahan Remisi Oleh Kepala Lapas Kelas IIA Baubau Abdul Waris

Laporan: Firman

BAUBAU, BP-Suasana Idul Fitri 1447 Hijriah di Lapas Kelas IIA Baubau berlangsung aman dan kondusif selama tiga hari pelaksanaan kunjungan khusus Lebaran. Di balik pengamanan ketat yang melibatkan aparat TNI dan Polri, ribuan keluarga silih berganti datang untuk bersilaturahmi den-

gan warga binaan.

Momentum Lebaran tersebut sekaligus menjadi ajang pemberian remisi khusus kepada narapidana. Sebanyak 284 warga binaan beragama Islam menerima pengurangan masa pidana yang diserahkan usai pelaksanaan salat Idul berjamaah, Senin (23/3/2026).

Kepala Lapas Kelas

IIA Baubau Abdul Waris mengatakan bahwa pemberian remisi merupakan bentuk penghargaan negara kepada narapidana yang telah menunjukkan perilaku baik serta memenuhi persyaratan administratif dan substantif.

"Remisi ini adalah hak warga binaan yang telah memenuhi syarat

Lanjut ke Hal: 7

Disperindag Baubau Pantau Harga Telur Pasca Idulfitri, Mulai Turun di Kisaran Rp 65 Ribu Hingga Rp 78 Ribu



Pedagang Telur di Pasar Wameo Kota Baubau

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau memastikan harga telur ayam ras di wilayahnya mulai stabil setelah sempat melonjak menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 H. Stabilitas ini didukung oleh membaiknya pasokan serta normalnya distribusi, terutama melalui jalur laut.

Kepastian tersebut diperoleh setelah Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah melakukan

pemantauan langsung di Pasar Wameo dan Pasar Karya Nugraha dalam beberapa hari terakhir pascalebaran.

Hasil pemantauan menunjukkan bahwa harga telur yang sebelumnya sempat mencapai Rp100.000 per rak kini turun signifikan. Di tingkat distributor, harga tercatat sekitar Rp65.000 per rak.

Sementara itu, harga di tingkat pedagang eceran berada pada kisaran Rp68.000 hingga Rp70.000 per rak, meski

masih ditemukan variasi harga lebih tinggi di sejumlah lapak.

Sejumlah pedagang masih menjual telur dengan harga Rp75.000 hingga Rp78.000 per rak. Kondisi ini dipengaruhi oleh kualitas produk, khususnya telur kategori pilihan atau ukuran jumbo yang memiliki nilai jual lebih tinggi.

Dari sisi ketersediaan, pasokan telur dilaporkan semakin membaik dibandingkan periode menjelang

Lanjut ke Hal: 7

Bus Wisata Gratis, Dishub Baubau Dongkrak Kunjungan Libur Idulfitri 2026 ke Pantai Nirwana dan Batu Sori Yang Jadi Favorit Warga dan Wisatawan



Dishub Kota Baubau Siapkan Bus Wisata Gratis Selama 3 Hari Libur Idul Fitri

Laporan: Firman

BAUBAU, BP- Pemerintah Kota Baubau melalui Dishub menghadirkan layanan bus wisata gratis selama tiga hari pada momentum Idulfitri 1447 Hijriah, sebagai upaya mendorong kunjungan wisata sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat dan pemudik ke destinasi un-

gulan.

Program yang berlangsung pada 23 hingga 25 Maret 2026 ini difokuskan pada rute menuju objek wisata favorit, khususnya kawasan pesisir seperti Pantai Nirwana dan Batu Sori yang selama ini menjadi tujuan utama wisatawan lokal.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Baubau, Idrus Tau-

fiq Saidi, mengatakan tren kunjungan wisata di daerah tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, seiring membaiknya fasilitas dan promosi destinasi.

"Dari sisi retribusi saja, terlihat peningkatan

Lanjut ke Hal: 7

Pemkab Buton Selatan Tegaskan Rekaman Viral Bupati Soal Mobil Dinas Diduga Telah Diedit, Berikut Penjelasan Resmi

arakat. Ia menambahkan bahwa konten tersebut berpotensi merupakan bentuk manipulasi informasi yang dapat memperkeruh situasi jika tidak disikapi secara bijak.

“Informasi tersebut tidak menggambarkan konteks yang utuh dan berpotensi merupakan bentuk manipulasi informasi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Diskominfo juga menyoroti adanya muatan provokatif dalam konten yang beredar, yang dinilai dapat memicu keresahan sosial dan memancing reaksi emosional publik.

“Kami melihat adanya potensi provokasi yang bisa menimbulkan keresahan serta kebencian di ruang digital,” katanya.

Pemerintah daerah kemudian mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpen-

garuh oleh informasi yang belum terverifikasi serta tidak turut menyebarkan konten yang diragukan kebenarannya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” ujar La Ode Aris.

Dalam konteks hukum, Pemkab mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang telah dimanipulasi dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

“Ada konsekuensi hukum bagi pihak yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang dimanipulasi atau mengandung unsur kebencian,” katanya menegaskan.

Fenomena viral-

nya konten digital yang menyesatkan bukan kali pertama terjadi di Indonesia. Sejak maraknya penggunaan media sosial pada dekade 2010-an, berbagai kasus hoaks dan disinformasi kerap muncul, terutama menjelang momentum politik maupun isu sensitif.

Secara nasional, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mencatat ribuan konten hoaks setiap tahunnya, yang sebagian besar tersebar melalui platform digital dan aplikasi pesan instan.

Di tingkat global, persoalan serupa juga menjadi perhatian serius. Laporan berbagai lembaga internasional menunjukkan bahwa manipulasi informasi digital telah menjadi tantangan besar da-

lam menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas sosial di berbagai negara.

Karena itu, literasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang terus didorong pemerintah guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi yang benar dan tidak menyesatkan.

Pemkab Buton Selatan menyatakan akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran terkait penyebaran rekaman tersebut.

Melalui klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat tetap menjaga kondusivitas daerah serta lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi di era digital. (*)

Bus Wisata Gratis, Dishub Baubau Dongkrak Kunjungan Libur Idulfitri 2026 ke Pantai Nirwana dan Batu Sori Yang Jadi Favorit Warga dan Wisatawan

dari sekitar Rp50 juta menjadi Rp181 juta pada 2025. Ini menunjukkan minat wisata masyarakat terus tumbuh,” ujarnya.

Ia menambahkan, fenomena peningkatan kunjungan wisata saat libur hari besar keagamaan bukan hanya terjadi di Baubau, tetapi juga secara nasional. Data Kementerian Pariwisata RI dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan lonjakan wisata domestik saat Idulfitri, dengan destinasi pantai menjadi favorit.

Secara global, tren serupa juga terjadi. Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) mencatat bahwa wisata berbasis alam dan pesisir mengalami peningkatan pasca-pandemi, karena dianggap lebih aman dan memberikan pengalaman rekreasi terbuka.

Di Baubau sendiri, program bus wisata gratis ini dijalankan oleh Dinas Perhubungan sebagai bagian dari pelayanan publik di sektor transportasi, sekaligus mendukung geliat ekonomi lokal selama libur Lebaran.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Baubau, La Ode Muhammad Takdir, menjelaskan bahwa kebijakan pemfokusan rute diambil berdasarkan evaluasi tahun sebelumnya.

Disperindag Baubau Pantau Harga Telur Pasca Idulfitri, Mulai Turun di Kisaran Rp 65 Ribu Hingga Rp 78 Ribu

Lebaran. Distribusi melalui jalur laut yang sebelumnya mengalami kendala kini telah kembali normal.

“Distribusi sudah kembali lancar, sehingga pasokan telur masuk secara bertahap dan berkelanjutan,” ujar Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Baubau, Suarmawati.

Ia menegaskan bahwa kondisi stok saat ini dalam keadaan aman dan mencakupi kebutuhan masyarakat. “Kami memastikan stok telur aman dan mampu memenuhi kebutuhan warga,” katanya.

Menurut Suarmawati, pemerintah juga terus melakukan pemantauan berkala guna menjaga stabilitas harga dan mengantisipasi potensi gangguan distribusi di masa mendatang.

Sebagai langkah

“Tahun lalu kami siapkan beberapa titik, tetapi minat masyarakat lebih terkonsentrasi di Pantai Nirwana dan Batu Sori. Karena itu, tahun ini kami fokuskan ke destinasi yang paling diminati,” katanya.

Ia mengungkapkan, pada hari pertama pelaksanaan, dua unit bus menuju Batu Sori terisi penuh, menandakan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program tersebut.

Operasional bus dilakukan secara berkala setiap dua jam, dimulai pukul 07.00 hingga 16.00 WITA, guna memastikan distribusi penumpang merata dan pelayanan berjalan optimal.

Untuk mengikuti layanan ini, masyarakat dapat mendaftar melalui sistem daring yang telah disediakan, dengan jumlah pendaftaran mencapai lebih dari 100 orang sebelum hari pelaksanaan.

Namun demikian, warga yang belum terdaftar tetap dapat langsung datang ke titik keberangkatan di Pantai Kamali, Kecamatan Wolio, yang menjadi pusat layanan angkutan wisata selama program berlangsung.

“Silakan masyarakat datang langsung, kami tetap melayani selama kap-

asitas masih tersedia,” ujar Takdir.

Menurutnya, program ini tidak hanya bertujuan memberikan kemudahan akses transportasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga tradisi masyarakat yang kerap memanfaatkan momen Idulfitri untuk berwisata bersama keluarga.

Sementara itu, Idrus berharap ke depan layanan tersebut dapat ditingkatkan dengan menghadirkan pemandu wisata agar pengalaman pengunjung menjadi lebih informatif.

“Kalau ada pemandu, wisatawan bisa memahami kawasan yang dilalui, tidak sekadar berkunjung tetapi juga mendapatkan edukasi,” katanya.

Ia menegaskan, penguatan sektor pariwisata memerlukan kolaborasi lintas perangkat daerah, termasuk dukungan transportasi yang memadai dan terjangkau bagi masyarakat.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pemerintah Kota Baubau optimistis sektor pariwisata akan terus berkembang dan menjadi salah satu pilar ekonomi daerah, terutama dalam memanfaatkan momentum libur nasional seperti Idulfitri. (*)

Remisi dan Silaturahmi Warnai Idul Fitri 1447 H di Lapas Kelas IIA Baubau, 284 Napi Dapat Pengurangan Hukuman

sesuai ketentuan pemerintah,” ujar Abdul Waris.

Dari total penerima remisi tersebut, sebanyak 283 orang merupakan laki-laki dan satu orang perempuan. Besaran remisi yang diberikan bervariasi, mulai dari 15 hari hingga dua bulan, tergantung masa pidana yang telah dijalani.

Secara rinci, sebanyak 56 narapidana memperoleh remisi 15 hari, 163 orang mendapat satu bulan, 42 orang menerima satu bulan 15 hari, dan 19 orang lainnya memperoleh pengurangan masa pidana selama dua bulan.

Namun, pada perayaan Idul Fitri tahun ini tidak ada narapidana yang langsung bebas melalui skema remisi karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan.

“Belum ada yang langsung bebas pada Lebaran tahun ini karena belum memenuhi syarat,” kata Abdul Waris.

Jika ditinjau dari jenis perkara, penerima remisi terbanyak berasal dari kasus perlindungan anak dengan jumlah mencapai 162 orang. Hal ini menunjukkan tingginya angka perkara tersebut di lingkungan pemasyarakatan setempat.

Saat ini, jumlah penghuni Lapas Ke-

las IIA Baubau tercatat sebanyak 503 orang, terdiri dari 498 laki-laki dan lima perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 44 narapidana tidak memperoleh remisi.

Mereka yang tidak mendapatkan remisi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain belum menjalani masa pidana minimal enam bulan, masih dalam proses hukum, melakukan pelanggaran tata tertib, menjalani pidana subsider, serta narapidana non-muslim yang berjumlah sembilan orang.

Selain pemberian remisi, layanan kunjungan khusus Lebaran juga menjadi perhatian utama pihak lapas. Kunjungan dibuka mulai pukul 08.00 hingga 16.00 Wita selama tiga hari berturut-turut.

Pada hari pertama, jumlah pengunjung mencapai ribuan orang, sementara pada hari kedua dan ketiga masih tercatat ratusan orang yang datang untuk bertemu keluarga mereka.

“Melalui kunjungan ini, warga binaan dapat merasakan kembali kehangatan keluarga di hari kemenangan,” ujarnya.

Pelayanan kunjungan dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP), dengan seluruh petugas

tetap siaga tanpa libur demi memastikan pelayanan berjalan optimal.

Pengunjung penyandang disabilitas juga mendapatkan prioritas pelayanan serta pendampingan khusus dari petugas selama berada di area kunjungan.

Berbeda dengan hari biasa, selama Idul Fitri seluruh warga binaan diperbolehkan menerima kunjungan dengan durasi lebih panjang, dari pagi hingga sore hari.

Meski demikian, pengawasan terhadap barang bawaan tetap diperketat. Pihak lapas melarang masuknya sejumlah barang seperti telepon genggam, narkoba, minuman keras, benda berbahan logam, serta barang lain yang berpotensi mengganggu keamanan.

“Selama tiga hari pelaksanaan kunjungan, situasi tetap aman dan tidak ada kendala berarti,” kata Abdul Waris.

Secara historis, pemberian remisi di Indonesia telah diajarkan dalam sistem pemasyarakatan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menekankan pembinaan narapidana se-

bagai bagian dari reintegrasi sosial.

Dalam praktiknya, remisi khusus keagamaan seperti Idul Fitri rutin diberikan setiap tahun kepada narapidana beragama Islam yang memenuhi syarat. Secara nasional, jumlah penerima remisi Idul Fitri setiap tahun dapat mencapai ratusan ribu orang di seluruh Indonesia.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara. Di sejumlah negara seperti Turki dan Arab Saudi, pengurangan masa hukuman atau pengampunan sering diberikan pada momen keagamaan atau nasional sebagai bagian dari kebijakan kemanusiaan dan reformasi sistem pemasyarakatan.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap warga binaan dapat lebih termotivasi untuk memperbaiki diri, menaati aturan, serta mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik.

Momentum Lebaran di Lapas Baubau tahun ini pun menjadi simbol bahwa keterbatasan ruang tidak menghalangi hadirnya rasa kebersamaan dan harapan baru bagi para warga binaan. (*)

Komisi I DPR Dalami Kasus Penyiraman Aktivistis KontraS, Dugaan Libatkan Intelijen



Seorang demonstran memegang poster wajah aktivis KontraS, Andrie Yunus di Yogyakarta, Sabtu (14/3/2026)

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, kian menjadi sorotan setelah pihak TNI mengamankan empat prajurit yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut. Penanganan kasus ini dinilai tidak bisa dilakukan secara biasa, mengingat adanya dugaan keterlibatan unsur intelijen negara.

Keempat prajurit yang diamankan masing-masing berinisial NDP, SL, BHW, dan ES. Mereka memiliki pangkat berbeda, yakni kapten, letnan satu, dan sersan dua, serta berasal dari satuan Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI (Denma BAIS) yang mencakup personel Angkatan Laut dan Angkatan Udara.

Perkembangan tersebut mendorong Komisi I DPR RI untuk mengambil langkah pengawasan. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menegaskan bahwa lembaganya memiliki kewenangan untuk mendalami kasus tersebut melalui mekanisme pemanggilan terhadap pemerintah dan institusi terkait.

"Kami memiliki kewenangan

untuk memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan dan memastikan penyelidikan berjalan menyeluruh," ujar Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (23/3/2026).

Menurut dia, kewenangan tersebut merujuk pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang mengatur sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan intelijen, baik secara internal maupun eksternal.

Ia menjelaskan bahwa pengawasan eksternal dilakukan oleh DPR melalui Komisi I yang secara khusus menangani bidang pertahanan, luar negeri, dan intelijen. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Komisi I telah membentuk tim pengawas tetap yang terdiri dari unsur pimpinan dan perwakilan fraksi.

Tim pengawas tersebut telah disahkan dalam rapat paripurna dan memiliki kewajiban menjaga kerahasiaan informasi intelijen sesuai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, DPR memiliki legitimasi untuk mengawasi kasus yang diduga melibatkan aparat intelijen.

Hasanuddin me-

nilai kasus ini harus ditangani secara transparan, profesional, dan akuntabel karena menyangkut kepercayaan publik terhadap institusi negara.

"Jika benar ada keterlibatan unsur intelijen, maka penanganannya tidak bisa dianggap sebagai kasus biasa," katanya.

Ia juga menekankan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu demi menjaga integritas institusi dan memastikan keadilan bagi korban.

"Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Kasus kekerasan terhadap aktivis sendiri bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam catatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, sejumlah kasus serangan terhadap pembela HAM pernah terjadi, termasuk intimidasi hingga kekerasan fisik yang belum seluruhnya terungkap secara tuntas.

Secara historis, kasus serupa juga pernah mengemuka dalam insiden penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan pada 2017 yang memicu perhatian

nasional dan internasional terhadap aparat penegak hukum dan aktivis.

Di tingkat global, serangan terhadap aktivis dan pembela HAM juga menjadi perhatian berbagai lembaga internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch yang secara konsisten menyoroti perlindungan terhadap kebebasan sipil dan keselamatan individu yang kritis terhadap kekuasaan.

Pengungkapan kasus Andrie Yunus dinilai menjadi ujian bagi komitmen negara dalam menegakkan hukum dan melindungi aktivis. Transparansi proses hukum serta akuntabilitas aparat menjadi faktor penting dalam memulihkan kepercayaan publik.

DPR melalui Komisi I menyatakan akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai prinsip hukum dan demokrasi, sekaligus memastikan tidak ada intervensi yang menghambat pengungkapan fakta.

Kasus ini sekaligus mengingatkan pentingnya sistem pengawasan terhadap lembaga intelijen agar tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.*

Komisi X DPR Minta Anggaran Pendidikan Tak Tersentuh Efisiensi APBN 2026



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian

Laporan: Alwan

JAKARTA, BP-Rencana pemerintah melakukan kementerian dan lembaga pada 2026 menuai sorotan dari DPR RI. Komisi X menegaskan agar kebijakan tersebut tidak menyasar sektor pendidikan yang dinilai sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah akan memangkas anggaran yang dinilai tidak efisien serta membatasi penguasaan program baru. Langkah ini diambil untuk menjaga keseimbangan fiskal di tengah tekanan ekonomi global.

"Kita akan memotong anggaran dan membatasi usulan baru agar belanja negara tetap terjaga," ujar Purbaya usai Salat Idulfitri di Jakarta, Sabtu (21/3/2026).

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mengingatkan agar efisiensi tidak berdampak pada anggaran pendidikan yang telah diamanatkan sebagai prioritas dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut dia, DPR akan mencermati secara kritis setiap kebijakan penghematan yang berpotensi mengganggu sektor pendidikan. "Menjaga defisit penting, tetapi tidak boleh mengorbankan pendidikan," kata Lalu, Rabu (25/3/2026).

Ia menilai pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualiti-

tas sumber daya manusia dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, alokasi pendidikan ditetapkan berkisar Rp757,8 triliun hingga Rp769,09 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp335 triliun dialokasikan untuk program makan bergizi gratis yang menjadi komponen terbesar dalam pos pendidikan.

Sementara itu, anggaran untuk tunjangan guru non-ASN, termasuk honorer, hanya mencapai sekitar Rp14,1 triliun atau 2,5 persen dari total anggaran pendidikan.

Lalu menilai komposisi anggaran tersebut perlu dikaji secara cermat agar tidak mengurangi kualitas program inti pendidikan. "Pemangkasan hanya boleh dilakukan secara selektif dan tidak menyentuh program utama," ujarnya.

Ia menambahkan, efisiensi seharusnya difokuskan pada pos non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program yang tumpang tindih di kementerian dan lembaga.

Dalam jangka pendek, pengurangan anggaran pendidikan berpotensi menekan bantuan operasional sekolah, program beasiswa, hingga kesejahteraan tenaga pendidik.

Adapun dalam jangka panjang, kebijakan tersebut dinilai dapat menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, serta melemahkan daya saing nasional.

"Kami bukan me-

nolak efisiensi, tetapi ingin memastikan kebijakan dilakukan secara cerdas dan terukur," kata Lalu.

Secara historis, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia telah diatur minimal 20 persen dari APBN sejak amandemen konstitusi awal 2000-an. Kebijakan ini diperkuat melalui berbagai regulasi turunan untuk menjamin keberlanjutan pendanaan sektor pendidikan.

Dalam praktiknya, Indonesia sempat menghadapi tantangan pemenuhan alokasi tersebut, terutama pada periode awal penerapannya. Namun, dalam satu dekade terakhir, porsi anggaran pendidikan relatif stabil bahkan meningkat seiring prioritas pembangunan sumber daya manusia.

Di tingkat global, negara-negara maju seperti Finlandia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa investasi besar pada pendidikan berkorrelasi kuat dengan peningkatan kualitas ekonomi dan inovasi nasional.

Organisasi seperti UNESCO juga merekomendasikan alokasi anggaran pendidikan yang memadai sebagai prasyarat utama pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kesenjangan sosial.

Karena itu, DPR menilai kebijakan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu target pembangunan sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

"Kebijakan fiskal harus tetap berpihak pada masa depan generasi bangsa," ujar Lalu.*

Arus Mudik Amolengo - Torobulu Naik 7 Persen, Ini Langkah Solusi Gubernur Sultra ASR



Gubernur Sultra ASR Turun Langsung Pantau Arus Mudik Lebaran

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP- Arus mudik Lebaran 2026 di lintasan penyeberangan Amolengo-Torobulu, Sulawesi Tenggara, mengalami peningkatan sekitar 7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan ini mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mengambil langkah antisipatif, termasuk menyiapkan program mudik gratis dan mengevaluasi keterbatasan armada kapal.

Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, turun langsung meninjau kondisi tersebut di Pelabuhan Amolengo dan Torobulu, Rabu (18/3/2026). Dalam kunjungannya, ia menekankan pentingnya keselamatan, kenyamanan, dan ketertiban sebagai prioritas utama selama arus mudik berlangsung.

"Untuk saat ini arus mudik berjalan lancar. Namun keterbatasan armada masih menyebabkan antrean. Ini akan kita evaluasi," ujar Andi Sumangerukka.

Ia menjelaskan, antrean panjang yang terjadi hingga berjam-jam disebabkan oleh keterbatasan jumlah

kapal yang beroperasi. Pemerintah daerah, kata dia, berkomitmen untuk menambah armada guna mengurai kepadatan di masa mendatang.

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sultra melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas penunjang. Mulai dari kesiapan tenaga kesehatan, posko pelayanan terpadu, hingga sistem pengaturan operasional kapal menjadi fokus perhatian.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur dan koordinasi lintas sektor menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran arus mudik. Ia meminta seluruh pihak bekerja maksimal untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

"Keselamatan itu nomor satu, jangan hanya mengejar aspek ekonomi," tegasnya.

Selain meninjau fasilitas, Gubernur juga berdialog langsung dengan para pemudik. Ia mendengarkan berbagai keluhan, terutama terkait lamanya waktu tunggu akibat antrean kapal.

Pemerintah Provinsi Sultra sendiri telah meny-

iapkan sekitar 10.000 tiket mudik gratis untuk membantu masyarakat. Program ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya perjalanan sekaligus mengendalikan kepadatan penumpang.

Secara historis, peningkatan arus mudik merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di Indonesia, Kementerian Perhubungan mencatat tren kenaikan mobilitas masyarakat saat Lebaran rata-rata mencapai 5-10 persen setiap tahun, terutama pada jalur penyeberangan dan darat.

Fenomena serupa juga terjadi di berbagai negara. Di Tiongkok, misalnya, tradisi mudik saat Tahun Baru Imlek atau Chunyun menjadi migrasi manusia terbesar di dunia, dengan miliaran perjalanan dalam satu periode. Hal ini menunjukkan bahwa lonjakan mobilitas saat hari besar keagamaan merupakan pola global yang membutuhkan manajemen transportasi yang matang.

Di Indonesia, pengalaman masa lalu juga menunjukkan bahwa keterbatasan armada dan

pengawasan keselamatan menjadi isu krusial dalam arus mudik. Sejumlah insiden penyeberangan pada dekade sebelumnya mendorong pemerintah memperketat regulasi kapasitas dan standar keselamatan transportasi.

Dalam konteks tersebut, Gubernur Sultra menegaskan pentingnya kepatuhan operator kapal terhadap aturan yang berlaku. Ia meminta agar tidak ada pelanggaran kapasitas muatan yang dapat membahayakan penumpang.

"Kami ingin seluruh pemudik bisa sampai di tujuan dengan selamat. Itu yang paling penting," ujarnya.

Secara umum, arus mudik di lintasan Amolengo-Torobulu tahun ini terpantau lancar meskipun diwarnai antrean. Pemerintah daerah memastikan akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi selama periode mudik berlangsung.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pulang ke kampung halaman. (*)

Di Wakatobi, Gubernur Sultra Ajak Perkuat Kepedulian Sosial dan Kolaborasi Pembangunan



Laporan: Mashuri

WAKATOB I, BP- Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, menyerukan penguatan kepedulian sosial dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah saat melaksanakan Safari Ramadan di Wakatobi, Kamis (12/3/2026), yang dirangkaikan dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Gubernur menyerahkan bantuan Pasang Baru Listrik (PBL) kepada 93 rumah tangga tidak mampu serta menyalurkan 150 paket sembako sebagai bentuk kepedulian terhadap warga di bulan suci Ramadan.

Ia menegaskan bahwa kepedulian sosial harus diwujudkan secara nyata melalui aksi berbagi dan dukungan terhadap masyarakat kurang mampu, terutama di tengah dinamika ekonomi yang dihadapi daerah.

"Dalam setiap harta yang kita miliki terdapat hak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena itu, zakat, infak, dan sedekah harus menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari," ujar Andi Sumangerukka dalam ceramahnya.

Safari Ramadan tersebut juga diisi dengan salat Tarawih berjamaah bersama masyarakat, yang menjadi momentum memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga.

Sebelumnya, kegiatan diawali dengan buka puasa bersama Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi serta jajaran

pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya membangun harmonisasi antar pemangku kepentingan.

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa Ramadan merupakan momentum strategis untuk memperkuat nilai kejujuran, keikhlasan, dan kesabaran, tidak hanya dalam kehidupan pribadi tetapi juga dalam menjalankan tugas pemerintahan.

"Ibadah puasa bukan hanya berdimensi spiritual, tetapi juga membentuk karakter dan integritas dalam menghadapi tantangan pembangunan," katanya.

Ia menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dicapai tanpa adanya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

"Harmonisasi dan kolaborasi adalah kunci agar program pembangunan berjalan optimal dan berkelanjutan," ujarnya.

Dalam ceramahnya, Gubernur juga mengutip kisah Nabi Musa AS yang diriwatkan oleh Al-Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, yang menekankan pentingnya amal sosial sebagai bentuk kecintaan kepada sesama.

Secara historis, tradisi Safari Ramadan oleh kepala daerah di Indonesia telah berkembang sejak era Orde Baru hingga Reformasi sebagai sarana mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sekaligus memperkuat legitimasi sosial

melalui pendekatan keagamaan.

Di tingkat nasional, praktik penguatan kepedulian sosial melalui zakat dan sedekah juga terus didorong oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis filantropi Islam.

Sementara itu, secara global, Ramadan dikenal sebagai periode peningkatan aktivitas filantropi di berbagai negara Muslim, termasuk di Timur Tengah dan Asia Selatan, di mana lembaga kemanusiaan internasional mencatat lonjakan donasi untuk membantu kelompok rentan.

Gubernur berharap nilai-nilai kepedulian sosial yang diperkuat selama Ramadan dapat menjadi energi kolektif dalam mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Tenggara.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan Ramadan sebagai titik awal perubahan menuju kehidupan sosial yang lebih adil dan berkeadaban.

"Kita jadikan Ramadan sebagai momentum memperbaiki diri dan memperkuat kebersamaan dalam membangun daerah," tuturnya.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan nilai sosial dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (*)

Buton Tengah Serius, Satu Tahun Azhari - Adam Bangun SDM, Infrastruktur, dan Perkuat Fondasi Kota Santri



Laporan:Ardi

BUTON TENGAH, BP- Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menegaskan arah pembangunan daerah yang berkelanjutan setelah satu tahun kepemimpinan Dr. Azhari dan Muhammad Adam Basan, dengan fokus pada penguatan identitas sebagai Kota Santri dan Kota Pendidikan.

Dalam periode tersebut, berbagai program prioritas mulai dijalankan secara terstruktur dan terukur. Pemerintah daerah mengedepankan pembangunan yang tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga menyentuh aspek moral dan intelektual masyarakat.

"Inilah komitmen kami dalam satu tahun pertama, meletakkan fondasi pembangunan yang kuat dan berkelanjutan," ujar Azhari dalam keterangannya.

Langkah strategis itu dirumuskan melalui visi besar yang menempatkan sektor pendidikan dan keagamaan sebagai pilar utama pembangunan daerah. Visi ini kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan lintas sektor.

Konsep Kota Pendidikan diwujudkan

melalui peningkatan mutu sekolah, pemerataan akses pendidikan hingga wilayah terpencil, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih modern dan inklusif.

Sementara itu, penguatan Kota Santri diarahkan pada pembinaan generasi muda dan dukungan terhadap pondok pesantren serta lembaga pendidikan Islam. Upaya ini menjadi bagian penting dalam membentuk karakter masyarakat yang religius.

"Kami ingin Buton Tengah tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga memiliki masyarakat yang kuat secara moral," kata Adam Basan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan berbagai elemen masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan.

Selain itu, transparansi dan pelayanan publik yang responsif terus diperkuat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pembangunan infrastruktur juga

menjadi perhatian utama dalam satu tahun terakhir. Upaya ini dilakukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Di sektor ekonomi, pemerintah daerah fokus pada penguatan ekonomi kerakyatan melalui program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara merata.

"Pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas hidup," tambah Azhari.

Seluruh program tersebut terangkum dalam semangat 'Buteng Serius', yang menjadi simbol komitmen pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berdaya saing dan berbudaya.

Secara historis, konsep pengembangan berbasis pendidikan dan religiusitas telah lama menjadi model pembangunan di berbagai daerah, seperti di Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar, serta di tingkat global dapat dilihat pada perkem-

bangun kota-kota pendidikan seperti Oxford yang tumbuh dari tradisi akademik kuat.

Di Indonesia sendiri, penguatan pendidikan sebagai pilar pembangunan telah menjadi agenda nasional sejak era reformasi, termasuk melalui program wajib belajar dan peningkatan akses pendidikan di daerah terpencil.

Dengan menempatkan pendidikan dan nilai religius sebagai fondasi, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah berharap mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional.

Memasuki tahun kedua kepemimpinan, pemerintah daerah menargetkan percepatan implementasi program prioritas agar dampaknya semakin dirasakan masyarakat luas.

"Ini baru langkah awal. Ke depan, kami akan terus memperkuat program agar Buton Tengah benar-benar menjadi daerah yang maju dan berkarakter," tutup Adam Basan. (*)

Open House di Rujab, Bupati Buton Alvin Akawijaya Jadi Wadah Silaturahmi Masyarakat



Laporan: La Harman

BUTON, BP- Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra menggelar open house Idul Fitri 1447 Hijriah di Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Buton, Pasarwajo, Sabtu (21/3/2026), sebagai upaya mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat pasca perayaan hari besar keagamaan tersebut.

Kegiatan ini berlangsung usai pelaksanaan Salat Idul Fitri 1 Syawal 1447 H yang digelar secara berjamaah di Lapangan Banabungi bersama ribuan masyarakat Kabupaten Buton.

Open house tersebut menjadi ruang terbuka bagi warga untuk bersilaturahmi secara langsung dengan kepala daerah serta jajaran pemerintah, sekaligus memperkuat komunikasi sosial dalam suasana Lebaran yang penuh kehangatan.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam kegiatan itu, di antaranya Anggota DPR RI Dapil Sultra Ali Mazi, Wakil Bupati Buton Syarifudin Saafa, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Buton La Ode Syamsudin.

Selain itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta berbagai elemen masyarakat juga tampak hadir memeriahkan kegiatan tersebut.

Bupati Alvin menyampaikan bahwa momentum Idul Fitri merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat.

"Open house ini bukan sekadar tradisi, tetapi menjadi sarana mempererat silaturahmi dan membangun kedekatan dengan masyarakat," ujar Alvin Akawijaya Putra.

Ia juga menambahkan bahwa nilai-nilai kebersamaan yang terbangun selama Ramadan dan Idul Fitri diharapkan dapat terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1447 H kepada seluruh masyarakat. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik ke depan," katanya.

Menurutnya, kegiatan seperti ini memiliki peran penting dalam menciptakan keharmonisan sosial dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Tradisi open house sendiri telah lama menjadi bagian dari budaya perayaan Idul Fitri di Indonesia, termasuk di lingkungan pemerintahan. Secara historis, tradisi ini berkembang sejak era kepemimpinan nasional awal pas-cakemerdekaan dan menjadi simbol ket-erbukaan pemimpin kepada rakyat.

Di tingkat nasional, kegiatan

open house kerap dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara sebagai ajang silaturahmi dengan masyarakat dari berbagai kalangan. Sementara itu, di tingkat internasional, tradisi serupa juga dikenal di sejumlah negara Muslim seperti Malaysia dan Brunei Darussalam, yang menjadikan open house sebagai bagian dari diplomasi sosial dan budaya.

Suasana akrab terlihat sepanjang kegiatan berlangsung, di mana masyarakat bebas berinteraksi, bersalaman, dan berbincang langsung dengan para pejabat tanpa sekat formalitas.

"M o m e n t u m seperti ini sangat penting untuk menjaga hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat," kata salah satu warga yang hadir.

Usai kegiatan di Rujab Bupati, agenda serupa juga dilanjutkan di kediaman Sekretaris Daerah Buton, La Ode Syamsudin, yang turut membuka rumahnya bagi masyarakat sebagai bagian dari tradisi Lebaran.

D e n g a n terselenggaranya kegiatan ini, pemerintah daerah berharap nilai-nilai persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas sosial semakin menguat di tengah masyarakat Kabupaten Buton. (*)

Pemerintah Batalkan Sekolah Daring April 2026, Tatap Muka Tetap Jalan



Ilustrasi

JAKARTA, BP-Pemerintah membatalkan rencana penerapan pembelajaran daring yang dijadwalkan mulai April 2026 dan memutuskan kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara tatap muka di seluruh Indonesia guna menjaga kualitas pendidikan dan mencegah learning loss.

Keputusan tersebut diambil melalui koordinasi lintas kementerian setelah mempertimbangkan efektivitas pembelajaran serta dampak sosial yang ditimbulkan jika sistem daring kembali diterapkan secara luas.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menegaskan bahwa pendidikan harus tetap berjalan optimal meskipun pemerintah tengah mendorong efisiensi energi di berbagai sektor.

“Di sektor pendidikan, proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss. Oleh karena itu, pembelajaran tetap diutamakan secara luring,” ujar Pratikno, Selasa (24/3/2026).

Wacana pembelajar-

ran daring sebelumnya muncul sebagai bagian dari strategi penghematan energi nasional di tengah tekanan pasokan global akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, pemerintah menilai bahwa sektor pendidikan tidak dapat disamakan dengan sektor lain dalam penerapan kebijakan efisiensi, karena menyangkut kualitas sumber daya manusia jangka panjang.

Evaluasi terhadap pengalaman pandemi Covid-19 menjadi dasar penting. Selama periode 2020-2022, pembelajaran daring diterapkan secara masif di Indonesia, namun meninggalkan sejumlah persoalan, mulai dari kesenjangan akses teknologi hingga penurunan capaian belajar siswa.

Secara internasional, laporan UNESCO menunjukkan lebih dari 1,6 miliar pelajar terdampak penutupan sekolah selama pandemi, yang berujung pada krisis pembelajaran global.

Di Indonesia, ka-

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mencatat adanya penurunan kemampuan literasi dan numerasi sebagai dampak dari pembelajaran jarak jauh yang berlangsung dalam waktu lama.

Penolakan terhadap rencana pembelajaran daring juga datang dari parlemen. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayanti, menilai kebijakan tersebut berisiko mengulang masalah yang terjadi saat pandemi.

“Pembelajaran daring pernah kita jalankan saat pandemi Covid-19, dan sistem tersebut meninggalkan problem yang tidak sederhana bagi dunia pendidikan kita,” kata Esti, Senin (23/3/2026).

Ia menambahkan bahwa pembelajaran jarak jauh tidak hanya berdampak pada aspek akademik, tetapi juga memengaruhi kedisiplinan dan pembentukan karakter siswa.

“Pembelajaran jarak jauh menimbulkan learning loss, di mana peserta didik kehilangan motivasi belajar dan kemampuan kognitifnya berpotensi menurun,” ujarnya.

Sebelumnya, pe-

merintah juga sempat mengkaji opsi pembelajaran hybrid sebagai jalan tengah antara efisiensi energi dan kualitas pendidikan. Namun, opsi tersebut dinilai belum mampu menjamin pemerataan kualitas pembelajaran di seluruh daerah.

“Koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi tetap berjalan tanpa mengganggu pelayanan publik,” kata Pratikno.

Dengan keputusan ini, sekolah di seluruh Indonesia tetap menjalankan pembelajaran tatap muka. Pemerintah akan mencari alternatif lain untuk menekan konsumsi energi tanpa mengorbankan sektor pendidikan.

Di sisi lain, program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan tetap berjalan dan tidak termasuk dalam kebijakan penghematan anggaran.

Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi energi dan keberlanjutan pembangunan sumber daya manusia di tengah dinamika global. (Lisna)

Gubernur Sultra ASR Dorong Fasilitas Sekolah Layak dan Modern Dengan Genjot Pendidikan Lewat Infrastruktur dan Bantuan di Buton Tengah



Laporan: Ardi

BUTON TENGAH, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan, dengan fokus pada revitalisasi sekolah dan bantuan seragam gratis bagi siswa. Langkah ini ditegaskan Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, saat kunjungan kerja di Kabupaten Buton Tengah, Sabtu (15/3/2026).

Kunjungan yang dirangkaikan dengan Safari Ramadan tersebut menjadi momentum untuk meninjau langsung pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi sekaligus memastikan program pendidikan berjalan efektif di daerah.

Dalam kesempatan itu, gubernur menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. “Pendidikan adalah investasi masa depan yang menentukan kemajuan daerah,” ujarnya.

Sebagai bentuk konkret, Pemrov Sultra mengalokasikan anggaran revitalisasi sejumlah SMA di Buton Tengah pada tahun anggaran 2026. Program ini difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan agar lebih layak dan modern.

Rincian anggaran meliputi SMA 3 Mawasangka sebesar Rp1,3 miliar, SMA 2 Mawasangka Rp1,2 miliar, SMA 2 Mawasangka Tengah Rp1,1 miliar, serta SMA 1 Sangia Wambulu sebesar Rp1,1 miliar. Selain itu, SMA 2

Lakudo mendapatkan alokasi Rp738 juta dan SMA 3 Gu sebesar Rp86 juta. Anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas lingkungan belajar siswa secara signifikan.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian langsung kepada siswa melalui program bantuan seragam sekolah gratis yang disalurkan melalui Yayasan ASR.

Bantuan tersebut diberikan kepada siswa Sekolah Luar Biasa di Kabupaten Muna, siswa di Muna Barat, serta siswa di Buton Tengah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban orang tua.

“Pembagian seragam sekolah ini merupakan bentuk kepedulian agar anak-anak tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya tambahan,” kata gubernur.

Dalam kunjungan tersebut, gubernur juga meninjau progres pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang dirancang sebagai pusat pembelajaran modern dan inklusif.

Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai menjadi fondasi penting dalam mencetak generasi unggul dan berdaya saing. “Kami ingin memastikan anak-anak mendapatkan fasilitas yang setara dengan daerah lain,” tambahnya.

Secara historis, perhatian terhadap pembangunan pendidikan di Indonesia telah menjadi agenda utama sejak program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah pada era 1980-an hingga diperluas menjadi wajib belajar 12 tahun pada dekade 2010-

an. Upaya tersebut terus diperkuat melalui peningkatan anggaran pendidikan yang secara konstitusional mencapai minimal 20 persen dari APBN.

Di tingkat global, investasi pendidikan juga menjadi prioritas sebagaimana tercermin dalam agenda United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization melalui program Education for All yang menekankan akses pendidikan berkualitas bagi semua kalangan.

Sejalan dengan itu, langkah yang dilakukan Pemrov Sultra dinilai sebagai bagian dari upaya mempercepat peningkatan kualitas SDM di daerah, khususnya di wilayah kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan.

Gubernur menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berorientasi pada fisik, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa. “Sekolah harus menjadi tempat yang nyaman untuk belajar sekaligus membentuk kepribadian anak,” ujarnya.

Melalui kombinasi revitalisasi infrastruktur dan bantuan langsung kepada siswa, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara optimistis dapat menciptakan generasi muda yang lebih siap menghadapi tantangan masa depan.

Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pendidikan di Buton Tengah, tetapi juga memberikan dampak luas bagi kemajuan daerah secara keseluruhan. (*)

<p>PT FAREN GRAFIKA</p> <p>Harian Pagi</p> <h1>Baubau Post</h1> <p>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</p> <p>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</p> <p>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</p> <p>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruokan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</p>	<p>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Prasetyo Korlip: Firman Redaktur: Kasrun, Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Amat Jr, Noval</p>	<p>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak: Jamaludin</p>	<p>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</p>	<p>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</p> <p>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</p> <p>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</p>
<p>Alamat Redaksi/Tata usaha: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara Tlp 0402-2014287- Email: baubaupost2019@gmail.com, ardiandina7786@gmail.com</p> <p>Percetakan: PT Faren Grafika, Alamat: Jalan Raya Palagimata (BTN Lipu Morikana) Blok K Nomor 01 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara</p>				

Kepala BAIS Letjen Yudi Abrimantyo Mundur Usai Kasus Air Keras, TNI Perkuat Penegakan Hukum Internal



Kepala BAIS TNI Letjen Yudi Abrimantyo mundur setelah insiden penyiraman air keras terhadap aktivis. TNI berkomitmen menegakkan hukum dan disiplin.

Laporan: Amran

JAKARTA, BP- Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat supremasi hukum dan disiplin prajurit menyusul mundurnya Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI, Yudi Abrimantyo, akibat kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Penegasan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi antara TNI dan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang berlangsung di Jakarta, Rabu (25/3/2026), sebagai respons atas insiden yang melibatkan oknum prajurit BAIS.

Rapat itu dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan, Panglima TNI Agus Subianto, serta Wakil Panglima TNI Tandyo Budi Revita.

Dalam pertemuan tersebut, TNI menyoroti pentingnya pembenahan sistem pengawasan internal serta penguatan kepemimpinan di setiap level koman-

do guna mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Aulia Dwi Nasrullah, menegaskan bahwa institusi tidak akan mentoleransi tindakan melanggar hukum oleh prajurit.

"TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujar Aulia dalam konferensi pers di Mabes TNI, Jakarta.

Ia menjelaskan, langkah penegakan hukum dilakukan melalui berbagai mekanisme, mulai dari peradilan militer hingga sanksi administratif seperti pencopotan jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat.

"Penegakan hukum dilakukan secara konsisten di seluruh jenjang, dari perwira hingga tamtama, termasuk terhadap pelanggaran seperti penganiayaan dan aktivitas ilegal lainnya," katanya.

Sementara itu, pengunduran diri Yudi Abrimantyo dinyatakan sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakan oknum BAIS yang melakukan penyiraman air keras

terhadap Andrie Yunus.

"Sebagai pertanggungjawaban, hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kepala BAIS," kata Aulia.

Proses serah terima jabatan tersebut telah dilakukan pada Rabu (25/3/2026), namun hingga kini TNI belum mengumumkan sosok pengganti Kepala BAIS yang baru.

Kasus ini kembali menyoroti isu kekerasan menggunakan air keras di Indonesia yang sebelumnya juga mencuat dalam sejumlah peristiwa besar. Salah satu yang paling dikenal adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Novel Baswedan pada 2017, yang menjadi perhatian nasional dan internasional terkait perlindungan aparat penegak hukum.

Secara global, penggunaan air keras sebagai alat kekerasan juga tercatat di berbagai negara seperti India dan Bangladesh, yang bahkan mendorong lahirnya regulasi ketat terhadap distribusi bahan kimia berbahaya untuk mencegah serangan serupa.

Dalam kon-

teks nasional, kasus-kasus tersebut mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk memperkuat regulasi serta penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan, termasuk dari kalangan aparat sendiri.

TNI menegaskan bahwa langkah pembenahan internal akan terus dilakukan melalui peningkatan pengawasan serta penanaman nilai disiplin dan integritas bagi seluruh prajurit.

Komitmen tersebut, menurut Aulia, juga merupakan bentuk dukungan terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat supremasi hukum.

"TNI memastikan setiap prajurit menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum, disiplin, dan nilai-nilai kebangsaan," ujarnya.

Peristiwa ini sekaligus menjadi ujian bagi institusi militer dalam menjaga kepercayaan publik, di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas yang semakin tinggi terhadap aparat negara. (*)

Aduan MAKI Mencuat, KPK Pastikan Status Tahanan Yaqut Sah Secara Hukum



KPK memastikan pengalihan status tahanan Yaqut Cholil Qoumas sesuai prosedur serta ketentuan undang-undang yang berlaku.

Laporan: Hadi

JAKARTA, BP- Polemik pengalihan status penahanan terhadap Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 mendapat sorotan publik setelah dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Rabu (25/3/2026).

Laporan tersebut menilai adanya dugaan pelanggaran etik dalam keputusan pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) menjadi penahanan rumah. Namun, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan langkah tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa seluruh proses pengalihan penahanan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, termasuk merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KU-HAP).

"KPK memastikan bahwa seluruh proses dan langkah yang diambil telah dilakukan sesuai mekanisme, prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," ujar Budi dalam keterangan tertulis.

Ia menjelaskan, pengalihan status penahanan dilakukan setelah adanya permohonan dari pihak keluarga tersangka, yang kemudian dika-

ji secara hukum oleh penyidik KPK.

Selain itu, KPK menegaskan bahwa selama menjalani penahanan rumah, pengawasan terhadap tersangka tetap dilakukan secara ketat guna menjamin kelancaran proses hukum.

"Kami tetap melakukan pengawasan melekat dan pengamanan terhadap tersangka selama masa penahanan rumah," kata Budi.

Di sisi lain, KPK juga menyatakan menghormati langkah MAKI yang melayangkan pengaduan etik sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga integritas lembaga antikorupsi.

"Kami meyakini Dewan Pengawas akan menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif, profesional, dan independen," tambahnya.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, sebelumnya menilai pengalihan status penahanan tersebut cacat hukum karena tidak melalui mekanisme keputusan kolektif kolegial pimpinan KPK.

"Kami memohon kepada Dewan Pengawas KPK untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap pihak-pihak yang memiliki peran dalam keputusan ini," ujar Boyamin di Kantor KPK, Jakarta.

Menurut Boyamin, pihak yang dilaporkan meliputi lima pimpinan KPK, Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, serta Juru Bicara KPK.

Secara historis, po-

lemik terkait pengalihan status penahanan bukan hal baru dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Dalam sejumlah kasus sebelumnya, seperti pada era awal berdirinya KPK pasca-Reformasi 1998, mekanisme penahanan sering menjadi sorotan publik karena menyangkut prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Di tingkat internasional, praktik pengalihan penahanan juga dikenal dalam berbagai sistem hukum, termasuk di negara-negara dengan tradisi hukum Anglo-Saxon maupun kontinental, sepanjang memenuhi syarat objektif seperti alasan kesehatan, kemanusiaan, atau kepentingan penyidikan.

Kasus yang menjerat Yaqut sendiri berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan kuota haji, yang menjadi salah satu sektor sensitif karena menyangkut pelayanan publik dan kepercayaan umat.

KPK menegaskan bahwa komitmennya dalam pemberantasan korupsi tidak akan terpengaruh oleh polemik yang berkembang, serta tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ke depan, hasil pemeriksaan oleh Dewan Pengawas KPK terhadap laporan MAKI diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga antikorupsi tersebut. (*)

Sholat Id di Pantai Kamali Halal dan Gelar Halal Vihalal Dirujab, Walikota Baubau HYF Perkuat Sinergi Pemerintah dan Warga



Walikota Baubau HYF dan keluarga Sholat Id di Pantai Kamali dan menggelar Open House di Rujab Walikota Baubau

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau H. Yusran Fahim, SE mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan nilai-nilai kebersamaan dan ketenteraman pasca-Ramadan dalam momentum halal bihalal Idulfitri 2026 yang digelar di Rumah Jabatan Wali Kota, Sabtu (21/3/2026).

Ajakan tersebut disampaikan di hadapan masyarakat dan jajaran Pemerintah Kota Baubau sebagai bentuk refleksi atas situasi kondusif yang terjaga selama bulan suci hingga hari raya.

Menurut Yusran, keberhasilan menjaga stabilitas kota tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang menunjukkan sikap toleransi dan kedewasaan sosial.

"Setelah Ramadan, yang terpenting adalah bagaimana kita melanjutkan nilai-nilai kebaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari," ujar Yusran dalam keterangannya.

Ia menegaskan, kondisi aman sela-

ma Ramadan hingga malam takbiran menjadi indikator kuat bahwa sinergi antara masyarakat dan pemerintah berjalan efektif.

Pelaksanaan takbiran pada Jumat malam (20/3/2026), lanjutnya, berlangsung tertib tanpa gangguan berarti, mencerminkan kesadaran kolektif warga dalam menjaga ketertiban umum.

"Berkat peran serta kita semua, setiap momen penting dapat terlaksana dengan baik demi Baubau yang lebih sejahtera," katanya.

Dalam perspektif yang lebih luas, tradisi halal bihalal sendiri memiliki akar historis kuat di Indonesia. Tradisi ini mulai populer pada era Presiden Soekarno sebagai sarana mempererat persatuan nasional pascakemerdekaan, khususnya dalam meredam konflik politik dan sosial.

Secara global, semangat Idulfitri juga mencerminkan nilai universal tentang re-

konsiliasi dan solidaritas. Di berbagai negara Muslim seperti Turki dan Arab Saudi, perayaan Idulfitri menjadi momen memperkuat hubungan sosial dan memperbaiki relasi antarindividu.

Yusran menilai, nilai-nilai tersebut relevan untuk terus dijaga di tingkat lokal, terutama dalam menghadapi tantangan sosial dan pembangunan kota.

"Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi menjaga keamanan Kota Baubau," ujarnya.

Ia menambahkan, ketenteraman selama Ramadan bukan hanya hasil kerja aparat, tetapi buah dari kesadaran masyarakat dalam menjaga harmoni sosial.

Kegiatan halal bihalal yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan itu juga menjadi ruang interaksi langsung antara pemerintah dan warga,

memperkuat komunikasi serta kepercayaan publik.

Dalam konteks pembangunan daerah, stabilitas sosial menjadi faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi, sebagaimana juga tercermin dalam berbagai kota di Indonesia yang berhasil menjaga keamanan wilayahnya.

Yusran pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan tersebut agar tidak hanya berhenti pada momentum Idulfitri.

"Mari kita sama-sama melangkah agar masyarakat Baubau ke depan jauh lebih tenteram dan lebih aman lagi," pungkasnya.

Dengan semangat Idulfitri, Pemerintah Kota Baubau berharap nilai persatuan, toleransi, dan kepedulian sosial dapat menjadi fondasi dalam membangun kota yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

Masjid Al Iqra Hadir di Perpusip, Wali Kota Baubau HYF Ingin Satukan Spirit Ilmu dan Iman



Laporan: Prasetyo M

BAUBAU, BP-Momentum bulan suci Ramadhan 1447 Hijriah dimanfaatkan Pemerintah Kota Baubau untuk memperkuat nilai spiritual di lingkungan kerja. Wali Kota Baubau, Yusran Fahim, meresmikan Masjid Al Iqra di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Perpusip), Minggu (15/3/2026).

Peresmian tersebut dirangkaikan dengan kegiatan buka puasa bersama yang berlangsung di pelataran Gedung Layanan Perpustakaan Daerah Kota Baubau dan dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh agama, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas inisiatif Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang menghadirkan fasilitas ibadah di lingkungan kerja.

Ia menegaskan bahwa pembangunan masjid tidak sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga menjadi simbol penting bagi penguatan nilai spiritual di tengah aktivitas pemerintahan.

Menurutnya, kehadiran masjid di

lingkungan kerja diharapkan mampu menjadi pusat pembinaan moral sekaligus mempererat hubungan antarpegawai dan masyarakat sekitar.

"Masjid ini kita harapkan menjadi tempat memperkuat keimanan, mempererat ukhuwah, serta membangun karakter yang lebih baik," ujarnya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyoroti pemilihan nama 'Al Iqra' yang dinilai sarat makna dan sangat relevan dengan fungsi perpustakaan sebagai pusat literasi.

Ia menjelaskan bahwa kata 'Iqra' yang berarti 'bacalah' merupakan perintah pertama dalam Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga memiliki keterkaitan erat dengan dunia ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, kehadiran Masjid Al Iqra di lingkungan Perpusip mencerminkan perpaduan harmonis antara penguatan intelektual dan spiritual.

Selain peresmian masjid, kegiatan tersebut juga diisi dengan aksi sosial melalui kerja sama dengan Badan Amil

Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau.

Dalam kesempatan itu, disalurkan bantuan kepada 32 penerima manfaat, termasuk empat orang dari kalangan mualaf.

Wali Kota menilai kegiatan buka puasa bersama dan penyaluran bantuan ini menjadi momen penting untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

"Melalui kegiatan ini, kita tidak hanya berbagi hidangan berbuka, tetapi juga berbagi kebahagiaan dan memperkuat persaudaraan," tambahnya.

Peresmian Masjid Al Iqra ditandai dengan penandatanganan prasasti sebagai simbol resmi beroperasinya rumah ibadah tersebut.

Kegiatan berlangsung khidmat dan mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang hadir.

Dengan hadirnya Masjid Al Iqra, diharapkan ekosistem literasi di Kota Baubau tidak hanya berkembang dari sisi intelektual, tetapi juga sejalan dengan penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. (*)